

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA KARANGLEWAS KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

Oleh:

Dini Lestarinigrum Bayu Sejati, Anwaruddin, Sendy Noviko

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal
Soedirman, Jl. Prof. Dr. H. R Boenyamin 708, Purwokerto, 53122**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Kampung Iklim Di Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model implementasi milik Thomas B Smith dimana terdapat 4 (empat) aspek yaitu, *Idealized policy, Target groups, Implementing organization, Environmental factor* kemudian pendekatan yang digunakan adalah *bottom-up*. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah Triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakansudahberhasil diidealkan namun masih terdapat pengurus program yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut sehingga tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim. Kemudian pengurus program belum melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang seharusnya. Target groupdalam hal ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Dusun IV, perangkat desa dan pengurus program dimana daya tanggap dan dukungan dari masyarakat penerima program cukup besar.*Implementing organization* dalam hal ini adalah pengurus Bank Sampah “Sampah Maju Jaya” serta Pemerintah Desa Karanglewas,berhasil menjalankan Program Kampung Iklim. Kemudian *environmental factor*, peneliti melihat tingkat pendidikan kelompok sasaran secara umum tidak mempengaruhi proses implementasi kebijakan kemudian pola kepemimpinan organisasi pelaksana menunjukkan hal yang baik. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas diantaranya terdapat panitia yang tidak bertempat tinggal di lokasi PROKLIM sehingga mengakibatkan proses pengawasan program tidak maksimal. Selain itu, belum adanya tindak lanjut dari kepala desa yang baru terhadap Program Kampung Iklim yang telah diimplementasikanmengakibatkan program tersebut tidak berjalanseperti sebelumnya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Kampung Iklim.

ABSTRACT

This study entitled "Implementation of the Climate Village Program in Karanglewas Village, Kutasari District, Purbalingga Regency". The purpose of this study was to implement the Climate Village Program in Karanglewas Village, Kutasari District, Purbalingga Regency.

The policy implementation model used is Thomas B Smith's implementation model where there are 4 (four) aspects, namely, idealized policy, target groups, implementing organization, environmental factors, then the approach used is bottom-up. The technique of taking informants using purposive sampling. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The validity of the data used was data triangulation. The data analysis technique used was the interactive model of Miles and Huberman's analysis.

The results showed that the policy had been successfully idealized but there were still program administrators who did not live in that location so that it was not in accordance with the guidelines for implementing the Climate Village Program. Then the program administrators have not carried out their duties as they should. The target group in this case is the people who live in RT.12 RW.06 Dusun IV, village officials and program administrators where the responsiveness and support of the program recipient communities is quite large. Implementing organizations in this case are the management of the Waste Bank "Sampah Maju Jaya "As well as the Karanglewas Village Government successfully running the Climate Village Program. Then the environmental factor researchers saw the level of education of the target group in general did not affect the policy implementation process then the leadership pattern of the implementing organization showed a good thing. There are inhibiting factors in the implementation of the Climate Village Program in Karanglewas Village, including the inhibiting factor, namely that there are committees who do not reside at the PROKLIM location, which results in the program monitoring process being not optimal and there is no follow-up from the new village head on the Climate Village Program that has been implemented so that resulting in the program not running as before.

Keywords: Policy Implementation, The Climate Village Program.

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim yang terjadi saat ini diyakini sebagai akibat adanya efek gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Berbagai kegiatan manusia dalam pembangunan menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin bertambah, termasuk proses penguraian sampah dan limbah, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan serta pembakaran jerami. Keberadaan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan radiasi gelombang panjang sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, peningkatan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer diperparah oleh

berkurangnya luas hutan atau deforestasi yang mempunyai kemampuan untuk menyerap karbon dioksida (CO₂).

Menanggapi permasalahan tersebut dibuatlah salah satu perjanjian internasional dalam bidang lingkungan yaitu Perjanjian Protokol Kyoto. Perjanjian ini merupakan refleksi dari keinginan masyarakat untuk mengurangi gas rumah kaca (RAN-GRK) di atmosfer yang setiap harinya semakin meningkat.

Program Kampung Iklim (PROKLIM) adalah program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tindak lanjut RAN-GRK. Pelaksanaan PROKLIM mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim dan selanjutnya untuk pedoman pelaksanaan diatur oleh Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim. Undang-Undang tersebut merupakan payung kebijakan bagi upaya pemerintah untuk membuat program yang berkaitan dengan upaya pengendalian dampak perubahan iklim, termasuk di dalamnya Program Kampung Iklim.

Tujuan umum pelaksanaan PROKLIM adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Program Kampung Iklim adalah program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang diharapkan yaitu, Pertama, Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan, dan kedua, Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan

tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum

PROKLIM di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencakup 928 lokasi di 27 Provinsi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana akan memperluas jumlah lokasi Program Kampung Iklim mencapai 2.000 pada tahun 2019 (Berita Satu).

Provinsi yang memiliki jumlah kampung iklim terbanyak adalah Jawa Tengah. Hingga tahun 2019 jumlah kampung iklim di Jawa Tengah mencapai 338 kampung iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah perusahaan dan desa-desa yang ada di Jawa Tengah untuk membentuk beberapa kampung iklim dan menargetkan Jawa Tengah akan memiliki sekitar 700 kampung iklim (Republika).

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang merespon tindakan ini adalah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga adalah kabupaten yang sudah mencanangkan Program Kampung Iklim sejak tahun 2017. Program Kampung Iklim di Purbalingga juga di dukung oleh Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang didalamnya mengatur visi misi Kabupaten Purbalingga, salah satunya (misi ke-7) Melestarikan Lingkungan Hidup. Program Kampung Iklim dianggap sebagai salah satu program yang tepat dalam mendukung peraturan daerah tersebut.

Untuk melaksanakan rencana tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan danayang berasal dari Dana Hibah APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.50.000.000,-. Dana tersebut dialokasikan kepada desa tertentu untuk membantu mendanai kegiatan pembentukan dan pengembangan kampung iklim.

Penggunaan dana ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penggunaan dana bantuan keuangan khusus untuk kegiatan pembentukan Kampung iklim tahun anggaran 2018, komponen penggunaan dana hibah tersebut meliputi :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
3. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pembibitan.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan longsor.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2019 jumlah kampung iklim di Kabupaten Purbalingga hanya berjumlah 11 Kampung Iklim dan belum dimiliki oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga (DLH Kabupaten Purbalingga:2009).

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Purbalinggadianggap sangat kurang.Selain itu, kurangnya pemahaman terkait teknologi pada pengelolaan *website* kampung iklim yang dilakukan di dalam Sistem Registri Nasional perubahan iklim atau sistem pencatatan data dan penyediaan informasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia menjadi penghambat implementasi PROKLIM di Kabupaten Purbalingga. Hal ini berakibat, hingga tahun 2019 hanya 1 (satu) dari 11 Kampung iklim di Purbalingga yang tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kampung Iklim tersebut ada di Desa Karanglewas, dengan nomor sertifikat 11-PK-II-2019-3722.(DLH Kabupaten Purbalingga: 2019).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di lokasi PROKLIM di Desa Karanglewas adalah dengan berupaya mengikutsertakan masyarakat sekitar kampung iklim untuk aktif dalam pembentukan kampung iklim. Hal ini diupayakan agar kapasitas masyarakat terkait pengetahuan mereka akan dampak perubahan iklim menjadi lebih baik. Disamping itu, upaya ini dilakukan agar masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Lokasi kegiatanPROKLIM tersebut berada di Dusun IV RT.12 RW.06.

Berdasarkan hasil pra survey, didapat informasi bahwa ditemukan Kampung Iklim di Desa Karanglewas tidak memiliki sistem kepengurusantersendiri. Kepengurusannya melekat padaPengurus Bank Sampah“SampahMaju Jaya”.

Berbagai macam fenomena yang sudah dipaparkan tersebut melatarbelakangi alasan penelitian tentang Implementasi Program Kampung Iklim ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian : Bagaimana implementasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga? Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi PROKLIM di Desa Karanglewas?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan sasaran penelitian adalah Perangkat Desa Karanglewas (meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala Dusun), Pengurus Bank sampah “Sampah Maju Jaya” atau yang dijadikan pengurus PROKLIM (meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara), Masyarakat sekitar PROKLIM atau masyarakat yang tinggal di Dusun IV Rt.12 Rw.06 Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah secara mendalam. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif, dimana dibutuhkan tiga (3) komponen, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini adalah pada tahap implementasi Program Kampung Iklim, mulai dari awal Perencanaan Program yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Desa Karanglewas, yaitu Pengurus Program Kampung Iklim yang juga merupakan Pengurus Bank Sampah “Sampah Maju Jaya”, Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat sekitar. Fokus penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori dari Thomas B. Smith yang menyatakan bahwa ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi yaitu, *Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization*, dan *Environmental Factor*. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik oleh karena itu banyak menimbulkan tekanan (*tension*) bagi terjadinya transaksi atau tawar menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

Implementasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagai kebijakan yang diidealisasikan (*Idealized Policy*), berdasarkan wawancara didapat hasil, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah berhasil mengidealisasikan Program Kampung Iklim dengan melihat dan memperhatikan kondisi atau kebutuhan kelompok sasaran. Program dibuat dengan beberapa pilihan kegiatan kemudian pelaksanaannya ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sehingga program ini dapat berjalan dan diterima oleh kelompok sasaran. Pengidealisasian kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakan program.

Berdasarkan pada model implementasi dari Smith (1973) *idealized policy* atau kebijakan yang diidealkan oleh perumus kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut juga dapat diidealisasikan kepada *target group*, dalam hal ini adalah pemerintah desa, pengurus program dan masyarakat sebagai penerima program. Hal inilah yang kemudian menjadikan program tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kelompok sasaran sudah memahami Program Kampung Iklim yang telah dilaksanakan di Desa Karanglewas.

Menurut Thomas B. Smith (1973), *target group* atau kelompok sasaran merupakan bagian dari *policy stakeholder* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh perumus kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari daya tanggap dan karakteristik kelompok sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya daya tanggap dari masyarakat penerima program yang cukup besar, baik didasarkan pada pemahaman maupun antusiasme kelompok sasaran terhadap program.

Dukungan masyarakat dapat terlihat sejak awal perencanaan. Mereka terlibat aktif dalam perumusan kebijakan yang dilakukan lewat musyawarah dusun (Musdus). Saat pelaksanaan program pun masyarakat terlibat pada kegiatan-kegiatan yang ada. Keterlibatan masyarakat terlihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan pembangunan taman PROKLIM, disamping juga pada kegiatan Program Kampung Iklim lainnya.

Faktor lingkungan (*environmental factor*) merupakan aspek selanjutnya yang dikaji. Thomas B. Smith (1973) menyebutkan, *environmental factor* merupakan unsur-unsur di lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi Program Kampung Iklim adalah kondisi sosial kelompok sasaran dan budaya politik organisasi pelaksana. Keduanya menjadi hal yang diamati dalam penelitian ini untuk

mengkaji aspek faktor lingkungan (*environmental factor*) dalam implementasi PROKLIM di Desa Karanglewas.

Dalam implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas, kondisi sosial kelompok sasaran dilihat dari tingkat pendidikannya. Berdasarkan pada hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan kelompok sasaran secara umum tidak mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program. Artinya, tingkat pendidikan kelompok sasaran yang rendah tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor budaya politik organisasi pelaksana dengan melihat pola kepemimpinan organisasi pelaksana. Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan, pola kepemimpinan organisasi pelaksana menunjukkan hal yang baik. Hal ini terlihat pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Musyawarah sebagai sebuah budaya politik yang dipilih tentu saja berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Asumsinya, keputusan yang diambil secara demokratis akan membawa hasil yang lebih baik.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian, setidaknya terdapat dua faktor penghambat. Faktor penghambat pertama adalah domisili pengurus. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ada pengurus yang tidak bertempat tinggal di lokasi PROKLIM. Hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan dan pengawasan program kurang maksimal. Faktor penghambat kedua, kepemimpinan. Kepala Desa sebagai pemimpin tentu saja menjadi salah satu tokoh sentral atas keberhasilan implementasi sebuah kebijakan di Desa. Fakta yang ada menyebutkan semenjak pergantian kepala desa, belum adanya tindak lanjut dari kepala desa baru terhadap Program Kampung Iklim yang telah di implementasikan sehingga mengakibatkan program tersebut tidak berjalan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan melihat 4 (empat) aspek dalam model implementasi menurut Thomas B. Smith dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Idealize Policy*. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sudah mampu mengidélisasikan Program Kampung Iklim sebagai sebuah kebijakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran. Hal ini akan memberi peluang dan rangsangan yang besar bagi kelompok sasaran (*target group*) untyk dapat melaksanakan program tersebut dengan baik.
2. *Target Group* (Kelompok Sasaran). Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program sudah terlihat sejak awal perencanaan di musyawarah dusun dan juga saat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan PROKLIM. Keterlibatan masyarakat menandakan antusiasme mereka terhadap program. Ini akan berdampak pada meningkatnya pemahaman mereka tentang program dan tujuan program.
3. *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana). Kampung Iklim di Desa Karanglewas belum memiliki kepengurusan sendiri. Pada pelaksanaannya, kepengurusannya dirangkap oleh Pengurus Bank Sampah “Sampah Maju Jaya”. Kondisi ini akan berdampak pada fokus kerja dan upaya simplifikasi program. Padahal Bank Sampah merupakan bagian yang dari Program Kampung Iklim. Kesibukan lain dari masing-masing pengurus juga memberikan dampak kurang optimalnya implementasi Program Kampung Iklim.
4. *Environmental Factor* (Faktor Lingkungan). Kondisi Sosial Kelompok Sasaran tidak terlalu berpengaruh terhadap implementasi program. Sementara musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat merupakan budaya politik organisasi pelaksana. Ini merupakan daya dukung terhadap partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan tentu saja akan memberikan legitimasi bagi PROKLIM di mata masyarakat.

Setidaknya terdapat 2 faktor yang menghambat implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas, antara lain:

1. Domisili Pengurus. Tidak semua pengurus tinggal di lokasi PROKLIM sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal.
2. Kepemimpinan. Semenjak pergantian kepala desa, belum adanya tindak lanjut mengenai program ini dari kepala desa yang baru. Hal ini menyebabkan Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas tidak berjalan lagi (mangkrak).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta., 2013.
- Pribadi, Bowo. *Republika*. Juli Rabu 24 , 2019.
<https://republika.co.id/berita/pv4zeu459/jawa-tengah-kini-miliki-338-kampung-iklim>
 (accessed Oktober 2019, 19).
- Rikin, Ari Supriyanti. *Berita Satu*. Maret 17, 2017.
<https://www.beritasatu.com/lingkungan/420095/klhk-targetkan-proklam-capai-2000-lokasi-di-2019> (accessed Oktober 15 , 2019).
- Smith, Thomas B. "The Policy Implementation." *Journal of Policy Science*. Vol 4, No. 2., 1973.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang *Program Kampung Iklim*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK- Setjen/Kum.1/11/2016
- Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.